

PROTEKSIONISME GLOBAL DAN MASA DEPAN EKSPOR INDONESIA

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Dunia bergerak menuju perdagangan yang lebih protektif, selektif, dan berbasis standar tinggi.

Indonesia harus naik kelas: dari ekspor komoditas menuju ekspor bernilai tambah, hijau, dan berdaya saing.



1. GELOMBANG PROTEKSIONISME GLOBAL



Proteksionisme meningkat akibat:

- Perang dagang & rivalitas AS-China
- Pandemi & krisis rantai pasok
- Keamanan nasional & teknologi
- Transisi energi & perubahan iklim
- Tekanan politik domestik

Bentuk Proteksionisme Modern



Dampak: biaya perdagangan naik, rantai pasok terfragmentasi, ketidakpastian meningkat.

2. KONDISI EKSPOR INDONESIA

Kinerja Ekspor 2025 (Jan-Des)

(Sumber: BPS, 2026)



Ekspor Utama Indonesia (2025)



3. TANTANGAN PROTEKSIONISME BAGI EKSPOR INDONESIA

- Tarif tinggi & perang dagang menekan permintaan.
- Hambatan nontarif semakin kompleks & mahal.
- Standar lingkungan (EUDR, CBAM) membatasi akses pasar.
- Ketergantungan pada komoditas & pasar utama.
- Persaingan ketat dari negara ASEAN & produsen lain.
- Biaya logistik tinggi & infrastruktur belum merata.
- Kualitas SDM, teknologi & produktivitas masih rendah.
- Ketidakpastian regulasi & perubahan kebijakan.
- Risiko trade diversion & banjir impor murah.
- Tuntutan keberlanjutan & traceability semakin ketat.



4. PELUANG STRATEGIS UNTUK INDONESIA



5. ISU STRATEGIS GLOBAL YANG HARUS DIANTISIPASI



EUDR (Uni Eropa): Komoditas sawit, kayu, karet, kakao, kopi, sapi harus dapat dibuktikan bebas deforestasi. Implementasi untuk perusahaan besar ditunda hingga **30 Desember 2026**.

6. STRATEGI KUNCI MEMPERKUAT EKSPOR INDONESIA



7. POSISI INDONESIA DI RANTAI PASOK GLOBAL



Tujuan: bergerak dari hilir ke hulu nilai tambah untuk meningkatkan devisa, lapangan kerja, dan kedaulatan ekonomi.

8. ROADMAP MENUJU EKSPOR INDONESIA YANG KUAT & BERKELANJUTAN



“ Proteksionisme global bukanlah akhir dari perdagangan, tetapi awal dari persaingan baru yang lebih cerdas. Indonesia harus adaptif, inovatif, dan berani naik kelas dalam rantai pasok global. ”

PRINSIP UTAMA



Kedaulatan Ekonomi



Daya Saing Global



Inklusivitas & Keadilan Sosial



Inovasi & Teknologi



Kolaborasi ASEAN



Ketahanan Rantai Pasok

EKSPOR YANG KUAT MENJADI JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045: MAJU, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN!



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

8 Juni 2026

Sebagai konteks mutakhir makalah ini, WTO mencatat perdagangan barang dunia tumbuh kuat pada 2025 tetapi diproyeksikan melambat pada 2026 karena tarif, ketegangan geopolitik, konflik Timur Tengah, dan tekanan pada jaringan energi/logistik global. WTO juga melaporkan peningkatan tajam cakupan perdagangan yang terkena tarif di ekonomi G20 pada periode pertengahan Oktober 2024–pertengahan Oktober 2025. ([World Trade Organization](#))

Bagi Indonesia, BPS mencatat ekspor Januari–Desember 2025 mencapai **US\$282,91 miliar**, naik **6,15%** dibanding 2024, dengan ekspor nonmigas mencapai **US\$269,84 miliar**; neraca perdagangan 2025 surplus **US\$41,05 miliar**, sementara awal 2026 masih mencatat surplus perdagangan tetapi sektor migas tetap defisit. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tekanan proteksionisme juga tampak melalui regulasi lingkungan dan rantai pasok, seperti EUDR Uni Eropa yang menuntut pembuktian bebas deforestasi untuk komoditas seperti sawit, meskipun implementasinya untuk perusahaan besar ditunda hingga **30 Desember 2026**. Di sisi domestik, Indonesia juga mulai mengatur ulang ekspor komoditas strategis seperti batu bara, sawit, dan ferroalloy melalui mekanisme pelaporan dan sentralisasi ekspor tertentu. ([Reuters](#))

PROTEKSIONISME GLOBAL DAN MASA DEPAN EKSPOR INDONESIA

Abstrak

Proteksionisme global kembali menguat dalam sistem perdagangan dunia kontemporer. Jika pada akhir abad ke-20 globalisasi ditandai oleh liberalisasi perdagangan, penurunan tarif, perluasan rantai nilai global, dan keyakinan bahwa pasar dunia akan semakin terbuka, maka dekade 2020-an menunjukkan arah yang lebih kompleks. Perang dagang, tarif, subsidi industri, kontrol ekspor, kebijakan nasionalisme ekonomi, standar lingkungan, aturan karbon, regulasi bebas deforestasi, dan pembatasan teknologi telah mengubah lanskap perdagangan internasional. Artikel ini membahas implikasi proteksionisme global bagi masa depan ekspor Indonesia. Dengan pendekatan ekonomi politik dan analisis kebijakan perdagangan, artikel ini menempatkan ekspor Indonesia dalam hubungan antara dinamika pasar global, kebijakan industri nasional, perubahan standar internasional, ketegangan geopolitik, dan strategi transformasi ekonomi. Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam, pasar domestik luas, posisi strategis di Indo-Pasifik, komoditas unggulan, potensi hilirisasi, serta peluang dalam rantai pasok energi bersih dan ekonomi digital. Namun, ekspor Indonesia juga menghadapi risiko: ketergantungan pada komoditas primer, tekanan regulasi lingkungan, hambatan nontarif, volatilitas harga global, persaingan negara produsen lain, biaya logistik, rendahnya kandungan teknologi, dan lemahnya diversifikasi pasar. Artikel ini menegaskan bahwa masa depan ekspor Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada volume komoditas, tetapi harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, kepatuhan standar global, diplomasi perdagangan aktif, integrasi UMKM, green supply chain, dan

penguatan industri manufaktur. Proteksionisme global harus dibaca bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peringatan agar Indonesia membangun ekspor yang lebih produktif, berkelanjutan, dan berdaulat. Artikel ini menyimpulkan bahwa masa depan ekspor Indonesia bergantung pada kemampuan negara, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpindah dari ekspor berbasis ekstraksi menuju ekspor berbasis inovasi, kualitas, keberlanjutan, dan nilai tambah.

Kata Kunci

Proteksionisme global; ekspor Indonesia; perdagangan internasional; hambatan nontarif; hilirisasi; EUDR; WTO; RCEP; diplomasi perdagangan; green supply chain; diversifikasi ekspor; industrialisasi; ekonomi politik.

1. Pendahuluan

Ekspor merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Melalui ekspor, Indonesia memperoleh devisa, memperkuat neraca perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar bagi dunia usaha, dan meningkatkan daya saing nasional. Dalam sejarah pembangunan ekonomi, negara-negara yang berhasil naik kelas umumnya mampu memperkuat ekspor bernilai tambah tinggi. Korea Selatan, Taiwan, Jepang, China, Vietnam, dan Singapura menunjukkan bahwa keterhubungan dengan pasar global dapat menjadi jalan menuju industrialisasi, pembelajaran teknologi, peningkatan produktivitas, dan kenaikan pendapatan per kapita.

Namun, masa depan ekspor Indonesia kini menghadapi lanskap global yang berubah. Dunia tidak lagi sepenuhnya bergerak menuju liberalisasi perdagangan. Globalisasi masih berlangsung, tetapi bentuknya lebih terfragmentasi, lebih politis, dan lebih penuh persyaratan. Negara-negara

besar kembali menggunakan tarif, subsidi industri, kontrol ekspor, kebijakan lokalisasi, standar lingkungan, regulasi karbon, dan pembatasan teknologi sebagai alat mempertahankan kepentingan nasional.

Perdagangan dunia tidak lagi hanya diatur oleh harga dan efisiensi, tetapi juga oleh keamanan nasional, geopolitik, perubahan iklim, kedaulatan teknologi, serta tekanan politik domestik.

Inilah yang disebut sebagai kebangkitan proteksionisme global.

Proteksionisme bukan fenomena baru. Sejak lama, negara menggunakan tarif dan pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri.

Namun, proteksionisme kontemporer memiliki wajah yang lebih kompleks. Ia tidak selalu tampil sebagai tarif konvensional. Ia dapat muncul sebagai standar lingkungan, sertifikasi sosial, aturan traceability, persyaratan karbon, subsidi industri hijau, kebijakan local content, pembatasan ekspor bahan strategis, dan pengendalian teknologi. Dengan kata lain, proteksionisme hari ini sering hadir dalam bentuk yang lebih halus, legalistik, teknokratis, dan dibungkus dengan narasi keamanan, keberlanjutan, atau kepentingan publik.

Bagi Indonesia, situasi ini menghadirkan tantangan besar. Indonesia selama ini memiliki kekuatan ekspor dalam komoditas seperti batu bara, minyak sawit, nikel, besi dan baja, karet, kopi, kakao, produk perikanan, tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk manufaktur tertentu. Sebagian ekspor Indonesia sangat bergantung pada permintaan China, Amerika Serikat, India, Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa. Ketika negara-negara tujuan ekspor menerapkan kebijakan protektif, standar baru, atau pembatasan pasar, ekspor Indonesia dapat terdampak.

Namun, proteksionisme global tidak hanya berarti ancaman. Ia juga dapat menjadi pemicu transformasi. Jika pasar global semakin menuntut produk hijau, transparan, bernilai tambah, dan memenuhi standar ketenagakerjaan, maka Indonesia harus meningkatkan kualitas ekspornya. Jika negara besar melakukan diversifikasi rantai pasok, Indonesia dapat menarik investasi. Jika dunia membutuhkan mineral kritis untuk transisi energi, Indonesia

dapat memperkuat hilirisasi. Jika konsumen global menuntut produk halal, etis, dan berkelanjutan, Indonesia dapat membangun keunggulan baru.

Artikel ini membahas proteksionisme global dan masa depan ekspor Indonesia dalam perspektif ekonomi politik. Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana Indonesia dapat mempertahankan dan memperkuat ekspor di tengah dunia yang semakin protektif, terfragmentasi, dan kompetitif? Pembahasan dilakukan melalui analisis dinamika proteksionisme, struktur ekspor Indonesia, hambatan tarif dan nontarif, isu sawit dan deforestasi, hilirisasi mineral, manufaktur, UMKM, diplomasi perdagangan, serta strategi ekspor masa depan.

2. Memahami Proteksionisme Global

Proteksionisme adalah kebijakan yang bertujuan melindungi produsen domestik dari persaingan luar negeri. Bentuk paling klasik adalah tarif impor, yaitu pajak atas barang yang masuk dari luar negeri. Tarif membuat barang impor lebih mahal sehingga produk domestik menjadi relatif lebih kompetitif. Bentuk lain adalah kuota impor, subsidi kepada industri domestik, persyaratan kandungan lokal, larangan impor, standar teknis, hambatan sanitari dan fitosanitari, serta regulasi administrasi.

Dalam teori perdagangan internasional, proteksionisme sering dikritik karena menurunkan efisiensi ekonomi. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa negara akan memperoleh manfaat jika berdagang sesuai keunggulan relatifnya. Perdagangan memungkinkan spesialisasi, skala ekonomi, transfer teknologi, dan harga yang lebih rendah bagi konsumen. Namun, dalam praktik politik, negara tidak hanya mengejar efisiensi. Negara juga mempertimbangkan pekerjaan domestik, keamanan pangan, keamanan energi, kedaulatan teknologi, stabilitas sosial, dan kepentingan kelompok industri tertentu.

Proteksionisme global modern memiliki beberapa ciri. Pertama, proteksionisme tidak lagi hanya dilakukan oleh negara berkembang yang

ingin melindungi industri muda. Negara maju juga semakin aktif melindungi sektor strategis seperti semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, energi bersih, pertanian, baja, aluminium, farmasi, dan teknologi digital. Kedua, proteksionisme sering dibenarkan dengan alasan keamanan nasional. Ketiga, proteksionisme semakin terkait dengan isu lingkungan dan standar sosial. Keempat, proteksionisme tidak selalu berupa larangan langsung, tetapi berupa persyaratan teknis yang mahal untuk dipenuhi.

Perubahan ini membuat sistem perdagangan dunia semakin rumit. WTO masih menjadi kerangka multilateral utama, tetapi efektivitasnya menghadapi tekanan karena meningkatnya tindakan unilateral, melemahnya mekanisme penyelesaian sengketa, dan meningkatnya konflik kepentingan antara negara besar. Ketika aturan multilateral melemah, negara kecil dan menengah menghadapi ketidakpastian lebih besar karena mereka tidak selalu memiliki kekuatan tawar sebesar negara besar.

Bagi Indonesia, proteksionisme harus dipahami secara realistis. Di satu sisi, Indonesia harus membela akses pasarnya ketika negara lain menerapkan kebijakan diskriminatif. Di sisi lain, Indonesia juga menggunakan beberapa kebijakan protektif atau restriktif untuk kepentingan domestik, seperti larangan ekspor bahan mentah tertentu, kewajiban domestic market obligation, dan kebijakan hilirisasi. Oleh karena itu, diskusi proteksionisme tidak boleh bersifat hitam putih. Yang penting adalah bagaimana kebijakan perdagangan digunakan secara strategis, konsisten, dan tetap memperhatikan aturan internasional.

3. Dari Globalisasi Terbuka ke Globalisasi Terfragmentasi

Pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an, dunia mengalami gelombang globalisasi yang kuat. Perdagangan internasional tumbuh cepat, rantai nilai global berkembang, tarif turun, China masuk WTO, dan perusahaan multinasional memperluas produksi lintas negara. Banyak negara berkembang memperoleh peluang ekspor melalui integrasi ke rantai nilai

global. Dalam periode ini, keterbukaan dianggap sebagai jalan menuju efisiensi dan pertumbuhan.

Namun, globalisasi terbuka mulai menghadapi kritik. Di negara maju, sebagian masyarakat merasa kehilangan pekerjaan manufaktur karena relokasi produksi ke negara berupah rendah. Ketimpangan meningkat. Populisme ekonomi tumbuh. Krisis keuangan global 2008 melemahkan kepercayaan terhadap pasar bebas. Perang dagang Amerika Serikat–China memperlihatkan bahwa perdagangan tidak dapat dipisahkan dari geopolitik. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa rantai pasok yang terlalu efisien tetapi terkonsentrasi dapat rapuh. Konflik Rusia–Ukraina dan ketegangan Timur Tengah memperkuat kekhawatiran terhadap energi, pangan, dan logistik.

Akibatnya, globalisasi tidak hilang, tetapi berubah. Dunia bergerak menuju globalisasi terfragmentasi. Produksi lintas negara tetap ada, tetapi perusahaan dan pemerintah berusaha mengurangi risiko ketergantungan. Muncul strategi China+1, friend-shoring, nearshoring, strategic autonomy, dan supply chain resilience. Negara tidak lagi hanya bertanya: “di mana produksi paling murah?”, tetapi juga “di mana produksi paling aman, paling terpercaya, dan paling sesuai dengan kepentingan geopolitik?”

Fragmentasi ini menciptakan peluang dan risiko bagi Indonesia. Peluang muncul karena perusahaan global mencari lokasi produksi alternatif di luar China. Indonesia dapat menarik investasi di sektor baterai, kendaraan listrik, tekstil, alas kaki, elektronik, makanan olahan, dan ekonomi digital. Namun, risiko muncul karena fragmentasi dapat mempersempit akses pasar, menciptakan blok perdagangan, dan meningkatkan standar masuk pasar.

Jika dunia terbagi menjadi blok-blok ekonomi, Indonesia harus menjaga strategi bebas aktif dalam perdagangan. Indonesia tidak boleh terlalu bergantung pada satu pasar atau satu kekuatan besar. Diversifikasi pasar menjadi sangat penting. Indonesia perlu memperluas ekspor ke ASEAN, India, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan pasar nontradisional, sambil

tetap mempertahankan akses ke China, Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan Uni Eropa.

Globalisasi terfragmentasi juga menuntut peningkatan kualitas diplomasi ekonomi. Negara tidak cukup hanya membuka pasar; negara harus aktif bernegosiasi, membela kepentingan industri, membangun standar, dan memperkuat posisi dalam perjanjian perdagangan.

4. Struktur Ekspor Indonesia: Kekuatan dan Kerentanan

Ekspor Indonesia memiliki beberapa kekuatan utama. Pertama, Indonesia memiliki basis komoditas yang kuat. Batu bara, minyak sawit, nikel, besi dan baja, karet, kopi, kakao, dan produk perikanan memberi kontribusi besar bagi devisa. Kedua, Indonesia memiliki produk manufaktur tertentu seperti tekstil, alas kaki, otomotif, elektronik, furnitur, dan produk kimia. Ketiga, Indonesia mulai memperkuat ekspor berbasis hilirisasi, terutama besi baja dan produk terkait nikel. Keempat, Indonesia memiliki peluang besar dalam produk halal, pangan olahan, ekonomi kreatif, dan produk hijau.

Namun, struktur ekspor Indonesia juga menyimpan kerentanan. Ketergantungan pada komoditas membuat ekspor rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga batu bara, sawit, atau nikel naik, ekspor meningkat. Tetapi ketika harga turun, kinerja ekspor melemah. Ketergantungan komoditas juga membuat nilai tambah terbatas jika produk diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi.

Kerentanan lain adalah konsentrasi pasar. Beberapa tujuan ekspor utama Indonesia adalah China, Amerika Serikat, India, Jepang, dan ASEAN. Ketika negara-negara ini mengalami perlambatan ekonomi atau menerapkan kebijakan protektif, ekspor Indonesia dapat terdampak. Misalnya, ekspor komoditas ke China sangat dipengaruhi oleh siklus industri dan properti China. Ekspor tekstil dan alas kaki ke Amerika Serikat dipengaruhi

permintaan konsumen dan kebijakan tarif. Ekspor sawit ke Uni Eropa dipengaruhi standar lingkungan dan regulasi deforestasi.

Selain itu, kandungan teknologi ekspor Indonesia masih perlu ditingkatkan. Negara yang ingin menjadi eksportir kuat jangka panjang perlu memiliki produk dengan kompleksitas ekonomi lebih tinggi. Produk dengan teknologi dan pengetahuan tinggi cenderung memiliki nilai tambah lebih besar, pasar lebih luas, dan daya tahan lebih baik terhadap fluktuasi harga. Indonesia perlu memperbesar ekspor produk manufaktur menengah-tinggi dan jasa modern.

Biaya logistik juga menjadi tantangan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi biaya transportasi domestik yang tidak kecil. Ekspor tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga oleh kualitas pelabuhan, jalan, pergudangan, cold chain, digitalisasi kepabeanan, dan kepastian pengiriman. Jika biaya logistik tinggi, produk Indonesia kalah kompetitif.

Dengan demikian, kekuatan ekspor Indonesia cukup besar, tetapi masa depannya bergantung pada kemampuan melakukan diversifikasi, peningkatan nilai tambah, efisiensi logistik, dan kepatuhan standar global.

5. Tarif, Perang Dagang, dan Dampaknya bagi Indonesia

Tarif kembali menjadi instrumen penting dalam politik perdagangan global. Negara besar menggunakan tarif untuk menekan mitra dagang, melindungi industri domestik, atau memperbaiki defisit perdagangan. Perang dagang Amerika Serikat–China menjadi contoh paling jelas. Tarif tidak hanya memengaruhi dua negara tersebut, tetapi juga mengubah pola perdagangan global. Barang dapat dialihkan ke pasar lain, perusahaan memindahkan sebagian produksi, dan negara ketiga memperoleh peluang sekaligus risiko.

Bagi Indonesia, perang tarif dapat berdampak melalui beberapa jalur. Pertama, jalur permintaan global. Jika tarif menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia, permintaan terhadap ekspor Indonesia melemah. Kedua, jalur harga komoditas. Perlambatan industri global dapat menekan harga batu bara, logam, karet, dan komoditas lain. Ketiga, jalur trade diversion. Indonesia dapat memperoleh peluang jika eksportir dari negara lain terkena tarif dan pembeli mencari pemasok alternatif. Keempat, jalur kompetisi impor. Barang dari negara yang terkena tarif dapat dialihkan ke pasar Indonesia sehingga menekan industri domestik.

Trade diversion dapat menjadi peluang bila Indonesia siap. Misalnya, jika pembeli Amerika mencari alternatif produk tekstil, alas kaki, furnitur, atau komponen dari luar China, Indonesia dapat mengambil pasar. Namun, jika Vietnam, India, atau Bangladesh lebih siap, peluang itu akan jatuh ke mereka. Kesiapan ditentukan oleh kapasitas produksi, standar kualitas, lead time, perjanjian perdagangan, logistik, dan hubungan dengan pembeli global.

Tarif juga dapat mengubah investasi. Perusahaan dapat memindahkan produksi ke negara yang memiliki akses pasar lebih baik. Indonesia dapat menarik investasi sebagai bagian dari strategi China+1. Namun, investor akan membandingkan Indonesia dengan negara ASEAN lain. Jika perizinan lambat, regulasi tidak pasti, atau biaya logistik tinggi, investor memilih negara lain.

Indonesia perlu memperkuat intelligence perdagangan. Pemerintah dan dunia usaha harus memantau perubahan tarif global, peluang substitusi pasar, dan risiko dumping. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kadin, asosiasi industri, dan perwakilan dagang perlu bekerja lebih terintegrasi untuk merespons perubahan tarif dunia secara cepat.

6. Hambatan Nontarif: Standar, Sertifikasi, dan Regulasi Teknis

Proteksionisme modern sering hadir sebagai hambatan nontarif. Hambatan nontarif mencakup standar teknis, persyaratan sanitari dan fitosanitari, aturan label, sertifikasi, prosedur kepabeanan, persyaratan keamanan, traceability, aturan lingkungan, dan verifikasi sosial. Sebagian hambatan nontarif sah karena melindungi kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan konsumen. Namun, sebagian dapat digunakan secara protektif untuk mempersulit produk asing.

Bagi Indonesia, hambatan nontarif menjadi tantangan besar karena banyak produk ekspor harus memenuhi standar berbeda di berbagai negara. Produk pangan harus memenuhi standar keamanan makanan. Produk pertanian harus memenuhi batas residu pestisida. Produk perikanan harus memenuhi standar kesehatan dan traceability. Produk kayu harus membuktikan legalitas dan keberlanjutan. Produk sawit harus menghadapi standar deforestasi. Produk tekstil harus memenuhi standar bahan kimia dan ketenagakerjaan. Produk logam dan industri dapat menghadapi standar karbon.

Masalahnya, banyak pelaku usaha Indonesia, terutama UMKM, belum siap memenuhi standar tersebut. Sertifikasi sering mahal. Dokumentasi rumit. Data rantai pasok tidak lengkap. Petani kecil dan produsen kecil kesulitan membuktikan asal-usul produk. Jika tidak dibantu, standar global dapat menjadi penghalang masuk pasar bagi pelaku kecil.

Namun, standar juga dapat menjadi peluang. Jika Indonesia mampu memenuhi standar tinggi, produk Indonesia dapat memperoleh reputasi lebih baik dan masuk pasar premium. Sertifikasi halal, organik, fair trade, sustainable palm oil, legal timber, low carbon steel, dan traceable seafood dapat menjadi keunggulan. Dengan kata lain, standar tidak harus dipandang sebagai beban; standar dapat menjadi strategi diferensiasi.

Pemerintah perlu membantu dunia usaha menghadapi hambatan nontarif melalui laboratorium pengujian, lembaga sertifikasi, diplomasi standar, pelatihan UMKM, digital traceability, dan subsidi sertifikasi untuk pelaku kecil. Indonesia juga perlu aktif dalam forum standard-setting internasional

agar tidak hanya menjadi penerima standar, tetapi ikut membentuk standar.

7. EUDR, Sawit, dan Politik Lingkungan dalam Perdagangan

Minyak sawit adalah salah satu komoditas ekspor penting Indonesia. Sawit memberikan devisa, menyerap tenaga kerja, mendukung petani kecil, dan menjadi bahan baku pangan, energi, kosmetik, serta industri oleokimia. Namun, sawit juga menjadi salah satu komoditas paling diperdebatkan dalam perdagangan global karena dikaitkan dengan deforestasi, emisi karbon, konflik lahan, dan biodiversitas.

Uni Eropa melalui regulasi bebas deforestasi menuntut agar komoditas tertentu yang masuk pasar Eropa dapat dibuktikan tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah batas waktu tertentu. Regulasi seperti ini mencerminkan perubahan besar dalam perdagangan global: akses pasar tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas, tetapi juga oleh jejak ekologis.

Bagi Indonesia, regulasi semacam EUDR menimbulkan dilema. Di satu sisi, Indonesia merasa kebijakan tersebut dapat menjadi hambatan nontarif yang merugikan negara produsen dan petani kecil. Persyaratan geolokasi, traceability, dan due diligence dapat mahal dan rumit. Di sisi lain, tuntutan keberlanjutan global tidak dapat diabaikan. Konsumen, investor, dan pemerintah negara tujuan ekspor semakin menuntut produk bebas deforestasi.

Respons Indonesia harus ganda: diplomasi dan transformasi. Diplomasi diperlukan untuk memastikan regulasi negara tujuan tidak diskriminatif, tidak proteksionis, dan mempertimbangkan kondisi negara produsen. Transformasi diperlukan agar produksi sawit Indonesia semakin berkelanjutan, transparan, dan dapat ditelusuri.

Indonesia telah memiliki instrumen seperti ISPO, tetapi kredibilitas dan implementasinya harus terus diperkuat. Petani kecil perlu dibantu dalam sertifikasi, pemetaan lahan, legalitas, produktivitas, dan akses pembiayaan. Produktivitas sawit rakyat harus ditingkatkan agar peningkatan produksi tidak bergantung pada ekspansi lahan. Digital traceability perlu dikembangkan dari kebun hingga ekspor. Konflik lahan harus diselesaikan secara adil.

Masa depan ekspor sawit tidak hanya bergantung pada melawan regulasi eksternal, tetapi juga pada membangun bukti bahwa sawit Indonesia dapat menjadi bagian dari ekonomi berkelanjutan. Jika Indonesia mampu menunjukkan sawit yang produktif, legal, traceable, dan ramah lingkungan, posisi tawar Indonesia akan lebih kuat.

8. Hilirisasi Mineral: Proteksionisme atau Strategi Pembangunan?

Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi mineral, terutama melalui larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di WTO dan mendapat tantangan dari Uni Eropa. Dari perspektif negara importir, kebijakan ini dipandang sebagai pembatasan ekspor yang mengganggu akses bahan baku. Dari perspektif Indonesia, kebijakan ini dipandang sebagai hak negara berkembang untuk memperoleh nilai tambah dari sumber daya alamnya.

Hilirisasi adalah bagian dari strategi pembangunan. Indonesia tidak ingin terus menjadi eksportir bahan mentah. Dengan membangun smelter, industri stainless steel, baterai, dan kendaraan listrik, Indonesia berharap memperoleh nilai tambah, teknologi, pekerjaan, dan pendapatan lebih besar. Secara ekonomi politik, hilirisasi adalah upaya mengubah posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Namun, hilirisasi juga memiliki risiko. Pertama, risiko ketergantungan pada investor asing dan teknologi asing. Jika industri hilir dikuasai modal dan teknologi luar tanpa transfer pengetahuan, Indonesia hanya memindahkan

sebagian nilai tambah tetapi tidak membangun kapabilitas nasional. Kedua, risiko lingkungan. Smelter dan industri mineral membutuhkan energi besar dan dapat menimbulkan pencemaran. Ketiga, risiko pasar. Harga nikel dan teknologi baterai dapat berubah. Keempat, risiko sengketa dagang. Kebijakan pembatasan ekspor dapat menimbulkan tekanan internasional.

Apakah hilirisasi termasuk proteksionisme? Jawabannya tergantung perspektif. Secara hukum perdagangan, pembatasan ekspor dapat dipersoalkan. Secara pembangunan, hilirisasi dapat dilihat sebagai kebijakan industri untuk memperbaiki struktur ekonomi. Negara maju dahulu juga menggunakan kebijakan industri. Karena itu, isu utamanya bukan apakah negara boleh melakukan hilirisasi, tetapi bagaimana hilirisasi dilakukan secara efektif, transparan, berkelanjutan, dan konsisten dengan komitmen internasional.

Masa depan ekspor Indonesia dalam sektor mineral harus bergerak dari ekspor bahan mentah menuju ekspor produk bernilai tambah tinggi. Namun, hilirisasi harus naik kelas: dari smelter ke material maju, komponen baterai, kendaraan listrik, daur ulang, riset, desain, dan teknologi. Jika tidak, Indonesia hanya menjadi lokasi pengolahan dasar dengan biaya lingkungan tinggi.

9. Manufaktur Indonesia di Tengah Proteksionisme

Manufaktur adalah kunci masa depan ekspor Indonesia. Negara yang ingin menjadi eksportir kuat tidak dapat hanya bergantung pada komoditas. Manufaktur memungkinkan diversifikasi, penciptaan pekerjaan, peningkatan produktivitas, dan pembelajaran teknologi. Namun, manufaktur Indonesia menghadapi tekanan dari proteksionisme global dan persaingan regional.

Industri tekstil dan alas kaki menghadapi persaingan dari Vietnam, Bangladesh, China, dan India. Industri elektronik Indonesia belum sekuat Malaysia, Vietnam, atau Thailand dalam rantai pasok global. Industri

otomotif memiliki basis domestik, tetapi ekspor masih perlu diperkuat. Industri makanan olahan memiliki potensi besar, tetapi harus memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas. Industri kimia, farmasi, dan alat kesehatan masih memiliki ketergantungan impor bahan baku.

Proteksionisme global dapat berdampak ganda bagi manufaktur. Di satu sisi, tarif negara besar dapat membuka peluang trade diversion. Di sisi lain, negara tujuan ekspor dapat memperketat aturan asal barang, standar ketenagakerjaan, dan karbon. Selain itu, subsidi industri di negara maju dapat membuat produk mereka lebih kompetitif, sehingga negara berkembang sulit bersaing.

Indonesia perlu memperkuat manufaktur melalui kebijakan industri yang terarah. Sektor prioritas harus dipilih berdasarkan potensi nilai tambah, ekspor, teknologi, dan pekerjaan. Misalnya, otomotif listrik, baterai, elektronik, farmasi, alat kesehatan, pangan olahan, petrokimia, tekstil teknis, industri maritim, dan produk halal. Namun, pemilihan sektor harus disertai disiplin kinerja. Insentif tidak boleh diberikan tanpa target ekspor, transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan kandungan lokal yang realistis.

Manufaktur juga membutuhkan ekosistem. Pabrik tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan pemasok lokal, logistik, listrik, air, tenaga kerja, pelabuhan, laboratorium, sertifikasi, pembiayaan, dan riset. Jika ekosistem lemah, ekspor manufaktur sulit bersaing.

10. UMKM dan Tantangan Ekspor di Era Standar Global

UMKM memiliki peran besar dalam ekonomi Indonesia, tetapi kontribusinya terhadap ekspor masih relatif terbatas dibanding potensinya. Banyak UMKM memiliki produk menarik: makanan olahan, kopi, rempah, kerajinan, fesyen, furnitur, kosmetik herbal, produk halal, dan ekonomi kreatif. Namun, untuk masuk pasar global, UMKM harus memenuhi standar

kualitas, volume, kemasan, sertifikasi, pembayaran, logistik, dan konsistensi pasokan.

Proteksionisme modern dapat memperberat UMKM. Sertifikasi mahal, dokumen ekspor rumit, standar lingkungan sulit dipenuhi, dan informasi pasar terbatas. Jika tidak ada dukungan, UMKM hanya menjadi penonton dalam perdagangan global. Padahal, ekspor UMKM penting untuk inklusi ekonomi dan pemerataan.

Pemerintah perlu memperkuat ekosistem ekspor UMKM. Pertama, pelatihan kualitas produk dan standar pasar. Kedua, bantuan sertifikasi halal, organik, keamanan pangan, dan standar ekspor. Ketiga, dukungan desain kemasan dan branding. Keempat, akses pembiayaan ekspor. Kelima, platform digital ekspor yang terhubung dengan logistik dan pembayaran. Keenam, agregator ekspor dan koperasi modern untuk mengatasi masalah skala. Ketujuh, promosi dagang di pasar nontradisional.

UMKM juga perlu masuk rantai pasok perusahaan besar. Tidak semua UMKM harus ekspor langsung. Banyak UMKM dapat menjadi pemasok komponen, bahan baku, jasa, kemasan, atau produk pendukung bagi eksportir besar. Supplier development menjadi penting. Perusahaan besar, BUMN, dan kawasan industri dapat membantu UMKM naik standar.

Masa depan ekspor Indonesia harus inklusif. Jika hanya perusahaan besar yang mampu memenuhi standar global, manfaat ekspor akan terkonsentrasi. Jika UMKM dibantu naik kelas, ekspor dapat menjadi alat pemerataan.

11. Diplomasi Perdagangan: Antara WTO, FTA, dan Pasar Nontradisional

Dalam dunia yang semakin protektif, diplomasi perdagangan menjadi sangat penting. Indonesia harus aktif di WTO, ASEAN, RCEP, APEC, G20,

dan perjanjian bilateral maupun regional. Diplomasi perdagangan bukan hanya tugas diplomat, tetapi juga strategi ekonomi nasional.

Di WTO, Indonesia perlu membela sistem perdagangan berbasis aturan. Negara berkembang membutuhkan aturan multilateral agar tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan tawar bilateral. Namun, WTO menghadapi masalah penyelesaian sengketa dan meningkatnya tindakan unilateral. Indonesia perlu mendukung reformasi WTO yang adil bagi negara berkembang.

Dalam perjanjian perdagangan bebas, Indonesia perlu bersikap strategis. FTA dapat membuka pasar, tetapi juga membuka persaingan. Indonesia harus memastikan bahwa perjanjian perdagangan mendukung industrialisasi, ekspor bernilai tambah, UMKM, dan transfer teknologi. Pemanfaatan FTA sering rendah karena pelaku usaha tidak memahami rules of origin, prosedur, dan peluang tarif. Karena itu, diplomasi perdagangan harus diikuti edukasi bisnis.

Pasar nontradisional perlu diperkuat. Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Amerika Latin, dan Asia Tengah memiliki potensi besar. Produk Indonesia seperti makanan olahan, sawit, tekstil, farmasi, halal products, kopi, rempah, kendaraan, dan produk konstruksi dapat memperoleh peluang. Namun, pasar nontradisional membutuhkan riset pasar, promosi, logistik, pembiayaan ekspor, dan hubungan diplomatik aktif.

Diplomasi perdagangan juga harus membela produk yang terkena hambatan nontarif. Indonesia perlu menggunakan data ilmiah, negosiasi teknis, aliansi dengan negara produsen lain, dan mekanisme penyelesaian sengketa bila diperlukan. Namun, diplomasi paling kuat adalah diplomasi yang didukung perbaikan domestik. Jika produk Indonesia benar-benar memenuhi standar keberlanjutan dan kualitas, posisi negosiasi menjadi lebih kuat.

12. Green Export: Masa Depan Baru Ekspor Indonesia

Pasar global bergerak menuju ekonomi hijau. Negara tujuan ekspor semakin memperhatikan emisi karbon, deforestasi, energi bersih, limbah, dan tanggung jawab sosial. Ini berarti masa depan ekspor Indonesia akan semakin ditentukan oleh kemampuan memenuhi standar keberlanjutan.

Green export bukan hanya ekspor produk lingkungan seperti panel surya atau kendaraan listrik. Green export juga berarti produk tradisional yang diproduksi secara lebih berkelanjutan: sawit bebas deforestasi, kayu legal, kopi berkelanjutan, perikanan traceable, tekstil rendah limbah, baja rendah karbon, dan produk industri dengan energi bersih. Dengan kata lain, semua ekspor akan semakin dinilai dari jejak ekologisnya.

Indonesia memiliki potensi besar untuk green export. Indonesia memiliki mineral untuk transisi energi, potensi panas bumi, surya, hidro, bioenergi, hutan tropis, karbon biru, dan biodiversitas. Namun, potensi ini harus dikelola dengan tata kelola kuat. Jika ekspor hijau dibangun dengan energi kotor, konflik lahan, atau kerusakan lingkungan, kredibilitasnya akan dipertanyakan.

Salah satu tantangan besar adalah energi industri. Produk manufaktur masa depan akan semakin dihitung berdasarkan intensitas karbon. Jika listrik industri berasal dari batu bara, produk Indonesia dapat menghadapi tekanan karbon. Karena itu, transisi energi menjadi bagian dari strategi ekspor. Kawasan industri hijau, energi terbarukan, efisiensi energi, dan sertifikat energi bersih akan menjadi penting.

Green export juga membutuhkan sistem data. Traceability memerlukan informasi dari hulu ke hilir. Petani, nelayan, koperasi, pabrik, pelabuhan, dan eksportir harus terhubung dalam sistem informasi yang dapat dipercaya. Digitalisasi rantai pasok menjadi bagian dari daya saing hijau.

13. Digitalisasi Ekspor dan Trade Intelligence

Proteksionisme global membuat informasi pasar semakin penting. Eksportir harus mengetahui tarif, standar, regulasi, preferensi konsumen, sertifikasi, pesaing, logistik, dan risiko politik. Di sinilah trade intelligence menjadi kunci. Negara yang mampu membaca perubahan pasar lebih cepat akan lebih siap menyesuaikan strategi ekspor.

Digitalisasi dapat membantu ekspor Indonesia dalam beberapa cara. Pertama, platform informasi pasar dapat memberi data tentang peluang produk dan negara tujuan. Kedua, sistem digital kepabeanan dapat mempercepat proses ekspor. Ketiga, e-commerce lintas negara dapat membuka akses UMKM ke pasar global. Keempat, digital traceability dapat membantu memenuhi standar lingkungan. Kelima, data analytics dapat membantu pemerintah memantau risiko trade diversion, dumping, dan perubahan permintaan.

Namun, digitalisasi ekspor membutuhkan integrasi. Sistem perizinan, sertifikasi, kepabeanan, logistik, pembiayaan, dan promosi dagang harus terhubung. Jika setiap sistem berdiri sendiri, pelaku usaha tetap menghadapi birokrasi digital yang rumit. National Single Window, sistem logistik nasional, dan layanan ekspor harus terus disederhanakan.

Indonesia juga perlu memperkuat perwakilan dagang dan economic intelligence di luar negeri. Atase perdagangan, ITPC, kedutaan, dan diaspora bisnis dapat menjadi mata dan telinga pasar. Mereka harus menghasilkan informasi praktis bagi eksportir, bukan hanya laporan umum.

Dalam era proteksionisme, kemampuan membaca regulasi negara tujuan sama pentingnya dengan kemampuan memproduksi barang. Eksportir yang terlambat mengetahui perubahan standar dapat kehilangan pasar. Karena itu, trade intelligence harus menjadi bagian dari strategi nasional ekspor.

14. Ekspor Jasa: Peluang yang Sering Terlupakan

Ketika membahas ekspor, perhatian sering tertuju pada barang. Padahal, ekspor jasa semakin penting dalam ekonomi global. Jasa mencakup pariwisata, pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, desain, konsultasi, animasi, musik, film, logistik, keuangan, dan jasa profesional. Ekspor jasa dapat menjadi sumber devisa dan pekerjaan berkualitas.

Proteksionisme terhadap jasa juga meningkat, terutama melalui regulasi data, lisensi profesional, pembatasan mobilitas tenaga kerja, dan aturan digital. Namun, peluang tetap besar. Indonesia memiliki potensi dalam pariwisata berkualitas, ekonomi kreatif, layanan digital, pendidikan internasional, telemedicine, animasi, game, dan jasa halal.

Pariwisata adalah ekspor jasa yang penting. Wisatawan asing membeli pengalaman di Indonesia, menghasilkan devisa, dan mendukung UMKM lokal. Namun, pariwisata harus naik kelas menjadi berkualitas dan berkelanjutan. Ketergantungan pada jumlah wisatawan tanpa pengelolaan lingkungan dapat merusak destinasi.

Jasa digital juga berpotensi. Anak muda Indonesia dapat menjual desain, aplikasi, konten kreatif, animasi, konsultasi digital, dan layanan profesional ke pasar global. Namun, ini membutuhkan keterampilan, bahasa, pembayaran internasional, perlindungan kekayaan intelektual, dan akses platform.

Ekspor jasa dapat membantu mengurangi ketergantungan pada komoditas. Negara seperti India menunjukkan bahwa jasa teknologi informasi dapat menjadi sumber devisa besar. Indonesia perlu membangun strategi ekspor jasa yang lebih serius, termasuk pendidikan talenta digital, promosi global, dan regulasi yang mendukung pekerja kreatif.

15. Risiko Dumping dan Banjir Impor

Proteksionisme global dapat menyebabkan trade diversion. Ketika suatu negara terkena tarif tinggi di pasar tertentu, barangnya dapat dialihkan ke

pasar lain, termasuk Indonesia. Jika barang masuk dengan harga sangat murah, industri domestik dapat tertekan. Fenomena ini sering disebut dumping atau banjir impor, meskipun secara hukum dumping memiliki definisi khusus.

Indonesia perlu melindungi industri domestik secara sah melalui instrumen trade remedies seperti anti-dumping, safeguard, dan countervailing duties. Namun, penggunaan instrumen ini harus berbasis data, transparan, dan sesuai aturan WTO. Perlindungan tidak boleh menjadi alasan mempertahankan industri yang tidak mau meningkatkan produktivitas.

Keseimbangan diperlukan. Jika Indonesia terlalu terbuka tanpa pengawasan, industri domestik dapat hancur oleh impor murah. Jika Indonesia terlalu protektif, konsumen menanggung harga mahal dan industri menjadi malas berinovasi. Kebijakan perdagangan harus melindungi dari praktik tidak adil, tetapi tetap mendorong efisiensi dan daya saing.

Industri tekstil, baja, keramik, elektronik, dan produk konsumen sering menghadapi tekanan impor. Pemerintah perlu memantau data impor secara real-time, memperkuat standardisasi, menindak impor ilegal, dan menggunakan instrumen trade remedies bila terbukti terjadi kerugian serius. Namun, industri juga harus memperbaiki kualitas, desain, produktivitas, dan pasar ekspor.

16. Pembiayaan Ekspor dan Peran Lembaga Keuangan

Ekspor membutuhkan pembiayaan. Eksportir membutuhkan modal kerja, pembiayaan produksi, asuransi ekspor, pembiayaan logistik, jaminan pembayaran, dan lindung nilai valuta asing. Banyak UMKM gagal ekspor bukan karena produknya buruk, tetapi karena tidak memiliki pembiayaan dan kapasitas administrasi.

Dalam dunia proteksionis dan penuh ketidakpastian, risiko pembayaran meningkat. Pembeli dapat menunda pembayaran. Nilai tukar berubah. Biaya logistik naik. Regulasi negara tujuan berubah. Karena itu, pembiayaan ekspor harus disertai manajemen risiko.

Indonesia memiliki lembaga pembiayaan ekspor, perbankan, asuransi, dan skema penjaminan. Namun, akses pelaku kecil masih perlu diperluas. Bank sering menilai UMKM ekspor terlalu berisiko. Padahal, dengan pendampingan, kontrak pembelian, asuransi, dan digital record, risiko dapat dikelola.

Pemerintah perlu memperkuat ekosistem pembiayaan ekspor. Pembiayaan tidak cukup hanya kredit. Diperlukan factoring, supply chain finance, export credit insurance, hedging, pembiayaan syariah, dan pembiayaan berbasis invoice. Untuk komoditas hijau, green finance dapat digunakan.

Pembiayaan juga harus diarahkan pada upgrading. Eksportir yang ingin memperoleh sertifikasi, memperbaiki mesin, mengurangi emisi, atau membangun traceability membutuhkan investasi. Jika pembiayaan hanya untuk modal kerja jangka pendek, transformasi sulit terjadi.

17. Peran Daerah dalam Masa Depan Ekspor

Ekspor Indonesia tidak hanya urusan pemerintah pusat. Banyak produk ekspor berasal dari daerah: kopi dari Aceh, Sumatra Utara, Toraja, Flores, dan Papua; kakao dari Sulawesi; rempah dari Maluku; perikanan dari wilayah pesisir; sawit dari Sumatra dan Kalimantan; furnitur dari Jepara; tekstil dari Jawa Barat dan Jawa Tengah; nikel dari Sulawesi dan Maluku Utara. Karena itu, strategi ekspor harus berbasis daerah.

Pemerintah daerah perlu menjadi fasilitator ekspor. Mereka dapat membantu pemetaan produk unggulan, sertifikasi, pelatihan, promosi, infrastruktur logistik, kawasan industri, dan kemitraan dengan eksportir.

Namun, kapasitas daerah sangat beragam. Ada daerah yang aktif mempromosikan produk, ada yang belum memiliki strategi ekspor jelas.

Proteksionisme global menuntut daerah memahami standar internasional. Misalnya, daerah penghasil sawit harus memahami traceability dan deforestasi. Daerah penghasil kopi harus memahami kualitas, indikasi geografis, dan specialty coffee. Daerah perikanan harus memahami standar keamanan pangan dan legal fishing. Daerah penghasil kayu harus memahami legalitas dan keberlanjutan.

Perguruan tinggi daerah dapat membantu. Mereka dapat melakukan riset pasar, pendampingan UMKM, inovasi produk, pengujian laboratorium, dan pelatihan ekspor. Kolaborasi pemerintah daerah, kampus, asosiasi bisnis, koperasi, dan perbankan dapat menciptakan ekosistem ekspor lokal.

Masa depan ekspor Indonesia harus lebih terdesentralisasi. Daerah tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi pusat nilai tambah lokal.

18. Skenario Masa Depan Ekspor Indonesia

Masa depan ekspor Indonesia dapat dibayangkan dalam tiga skenario.

Skenario pertama adalah skenario stagnasi komoditas. Dalam skenario ini, Indonesia tetap bergantung pada batu bara, sawit, nikel, dan komoditas primer. Ekspor naik ketika harga global naik, tetapi turun ketika harga melemah. Standar lingkungan semakin menekan. Nilai tambah terbatas. Indonesia tetap rentan terhadap siklus komoditas. Ini adalah skenario yang harus dihindari.

Skenario kedua adalah skenario adaptasi parsial. Indonesia berhasil mempertahankan ekspor komoditas sambil meningkatkan sebagian hilirisasi. Beberapa sektor manufaktur tumbuh, tetapi diversifikasi belum cukup kuat. UMKM mulai masuk pasar global, tetapi masih terbatas. Indonesia bertahan di tengah proteksionisme, tetapi belum menjadi eksportir bernilai tambah tinggi. Ini skenario moderat.

Skenario ketiga adalah skenario transformasi ekspor. Indonesia berhasil membangun ekspor berbasis nilai tambah, keberlanjutan, teknologi, dan diversifikasi pasar. Hilirisasi mineral naik ke baterai dan kendaraan listrik. Sawit menjadi lebih traceable dan berkelanjutan. Manufaktur menengahkan tumbuh. UMKM masuk rantai nilai. Ekspor jasa digital berkembang. Energi bersih memperkuat green export. Indonesia aktif dalam diplomasi perdagangan dan standard-setting. Ini skenario yang diharapkan.

Untuk mencapai skenario transformasi, Indonesia membutuhkan konsistensi kebijakan. Transformasi ekspor tidak terjadi dalam satu tahun. Ia membutuhkan investasi jangka panjang, pendidikan, riset, infrastruktur, logistik, diplomasi, dan tata kelola.

19. Strategi Kebijakan untuk Masa Depan Ekspor Indonesia

Ada beberapa strategi utama yang perlu ditempuh.

Pertama, diversifikasi produk ekspor. Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah dan memperbesar ekspor manufaktur, pangan olahan, produk halal, jasa digital, ekonomi kreatif, farmasi, alat kesehatan, dan produk hijau.

Kedua, diversifikasi pasar. Indonesia harus memperluas pasar nontradisional di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Amerika Latin, dan Eropa Timur, sambil menjaga pasar utama.

Ketiga, industrial upgrading. Hilirisasi harus naik dari pengolahan dasar menuju produk akhir, desain, teknologi, riset, dan merek.

Keempat, penguatan standar dan sertifikasi. Pemerintah perlu menyediakan laboratorium, lembaga sertifikasi, pelatihan, dan bantuan biaya bagi pelaku kecil.

Kelima, green supply chain. Ekspor harus memenuhi standar keberlanjutan melalui traceability, energi bersih, efisiensi, dan tata kelola lingkungan.

Keenam, diplomasi perdagangan aktif. Indonesia harus membela kepentingan ekspor melalui WTO, FTA, RCEP, ASEAN, G20, dan forum bilateral.

Ketujuh, penguatan logistik. Pelabuhan, cold chain, pergudangan, digital customs, dan konektivitas daerah harus diperbaiki.

Kedelapan, digital trade intelligence. Indonesia membutuhkan sistem informasi pasar, pemantauan hambatan dagang, dan analitik ekspor real-time.

Kesembilan, integrasi UMKM. UMKM harus didukung melalui supplier development, agregator ekspor, koperasi modern, pembiayaan, dan sertifikasi.

Kesepuluh, pembiayaan ekspor. Skema pembiayaan, asuransi, jaminan, dan lindung nilai perlu diperluas.

Kesebelas, reformasi regulasi. Kebijakan ekspor harus konsisten, transparan, dan tidak menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Keduabelas, penguatan SDM. Ekspor modern membutuhkan pekerja terampil dalam produksi, kualitas, desain, digital, bahasa, logistik, dan standar.

20. Kesimpulan

Proteksionisme global telah mengubah masa depan perdagangan dunia. Dunia tidak lagi bergerak dalam jalur liberalisasi yang sederhana. Tarif, hambatan nontarif, standar lingkungan, subsidi industri, kontrol ekspor, dan politik rantai pasok semakin menentukan akses pasar. Bagi Indonesia, perubahan ini merupakan tantangan besar karena ekspor Indonesia masih memiliki ketergantungan pada komoditas dan menghadapi tekanan standar global.

Namun, proteksionisme global juga dapat menjadi momentum transformasi. Indonesia tidak boleh hanya merespons dengan keluhan atau retaliasi. Indonesia harus memperkuat fondasi ekspornya: nilai tambah, kualitas, keberlanjutan, diversifikasi, inovasi, dan daya saing. Jika dunia menuntut produk bebas deforestasi, Indonesia harus membangun traceability dan produktivitas pertanian berkelanjutan. Jika dunia membutuhkan mineral kritis, Indonesia harus melakukan hilirisasi yang naik kelas. Jika pasar menuntut produk rendah karbon, Indonesia harus mempercepat energi bersih. Jika standar semakin kompleks, Indonesia harus memperkuat sertifikasi dan diplomasi standar.

Masa depan ekspor Indonesia bergantung pada pilihan strategis hari ini. Indonesia dapat tetap menjadi eksportir komoditas yang rentan terhadap harga dan proteksionisme, atau menjadi eksportir bernilai tambah tinggi yang kompetitif dalam ekonomi hijau dan digital. Pilihan kedua membutuhkan kerja keras: reformasi industri, logistik, SDM, tata kelola, pembiayaan, dan diplomasi perdagangan.

Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menjadikan proteksionisme global sebagai dorongan untuk naik kelas. Ekspor Indonesia masa depan harus bukan hanya lebih besar, tetapi lebih cerdas: lebih beragam, lebih hijau, lebih bernilai tambah, lebih inklusif, dan lebih berdaulat. Itulah jalan agar ekspor menjadi pilar penting menuju Indonesia Emas 2045.

Glossarium

Anti-Dumping

Instrumen kebijakan perdagangan untuk mengenakan bea tambahan terhadap barang impor yang dijual di bawah harga wajar dan merugikan industri domestik.

Carbon Border Adjustment

Kebijakan yang mengenakan biaya karbon terhadap produk impor berdasarkan emisi yang terkandung dalam proses produksinya.

China+1

Strategi perusahaan global untuk tetap memproduksi di China sambil menambah lokasi produksi alternatif di negara lain.

Diversifikasi Ekspor

Upaya memperluas jenis produk dan pasar tujuan ekspor agar tidak bergantung pada sedikit komoditas atau negara tujuan.

Domestic Market Obligation (DMO)

Kewajiban bagi produsen atau eksportir untuk memasok sebagian produk ke pasar domestik sebelum melakukan ekspor.

Dumping

Praktik menjual barang ke pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga normal atau biaya produksi, sehingga dapat merugikan industri negara importir.

EUDR

European Union Deforestation Regulation, regulasi Uni Eropa yang mewajibkan komoditas tertentu bebas dari deforestasi agar dapat masuk pasar Uni Eropa.

Export Credit Insurance

Asuransi yang melindungi eksportir dari risiko gagal bayar pembeli luar negeri atau risiko politik di negara tujuan.

Green Export

Ekspor produk yang diproduksi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, emisi rendah, traceability, dan standar sosial.

Green Supply Chain

Rantai pasok yang memperhatikan lingkungan, efisiensi energi, emisi karbon, pengurangan limbah, dan tanggung jawab sosial.

Hambatan Nontarif

Hambatan perdagangan selain tarif, seperti standar teknis, sertifikasi, kuota, prosedur administrasi, dan persyaratan lingkungan.

Hilirisasi

Proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

Industrial Upgrading

Peningkatan kemampuan industri dari aktivitas bernilai tambah rendah menuju aktivitas bernilai tambah tinggi seperti desain, teknologi, riset, dan merek.

ISPO

Indonesian Sustainable Palm Oil, sistem sertifikasi keberlanjutan sawit Indonesia.

Proteksionisme

Kebijakan yang melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri melalui tarif, kuota, subsidi, standar, atau pembatasan lain.

RCEP

Regional Comprehensive Economic Partnership, perjanjian perdagangan regional antara ASEAN dan mitra utama Asia-Pasifik.

Rules of Origin

Aturan yang menentukan asal suatu barang untuk mendapatkan fasilitas tarif dalam perjanjian perdagangan.

Safeguard

Instrumen perlindungan sementara untuk industri domestik yang mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor.

Trade Diversion

Peralihan arus perdagangan dari satu negara ke negara lain akibat perubahan tarif, kebijakan, atau hambatan perdagangan.

Trade Intelligence

Pengumpulan dan analisis informasi pasar, regulasi, tarif, standar, pesaing, dan peluang ekspor untuk mendukung keputusan perdagangan.

Traceability

Kemampuan menelusuri asal-usul produk dari bahan baku hingga produk akhir dalam rantai pasok.

WTO

World Trade Organization, organisasi internasional yang mengatur perdagangan antarnegara melalui aturan multilateral.

Daftar Pustaka

Amiti, M., Redding, S. J., & Weinstein, D. E. (2020). Who's paying for the US tariffs? A longer-term perspective. *AEA Papers and Proceedings*, 110, 541–546. <https://doi.org/10.1257/pandp.20201018>

Antràs, P. (2020). Conceptual aspects of global value chains. *Annual Review of Economics*, 12, 113–141. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-082019-022743>

Badan Pusat Statistik. (2026). *Exports and imports of Indonesia in December 2025 reached USD26.35 billion and USD23.83 billion, respectively*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Trade balance surplus at the beginning of 2026*. BPS-Statistics Indonesia.

Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the new globalization*. Harvard University Press.

- Baldwin, R., & Freeman, R. (2022). Risks and global supply chains: What we know and what we need to know. *Annual Review of Economics*, 14, 153–180. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-051420-113737>
- Bown, C. P. (2021). The US–China trade war and phase one agreement. *Journal of Policy Modeling*, 43(4), 805–843. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.02.009>
- Cadot, O., Carrère, C., & Strauss-Kahn, V. (2011). Export diversification: What's behind the hump? *Review of Economics and Statistics*, 93(2), 590–605. https://doi.org/10.1162/REST_a_00078
- European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation-free products*. Official Journal of the European Union.
- Evenett, S. J., & Fritz, J. (2025). *G20 trade policy factbook 2025*. Global Trade Alert.
- Fajgelbaum, P. D., Goldberg, P. K., Kennedy, P. J., & Khandelwal, A. K. (2020). The return to protectionism. *The Quarterly Journal of Economics*, 135(1), 1–55. <https://doi.org/10.1093/qje/qjz036>
- Feenstra, R. C. (2018). Restoring the product variety and pro-competitive gains from trade with heterogeneous firms and bounded productivity. *Journal of International Economics*, 110, 16–27. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.10.007>
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does trade cause growth? *American Economic Review*, 89(3), 379–399. <https://doi.org/10.1257/aer.89.3.379>
- Gereffi, G. (1999). International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain. *Journal of International Economics*, 48(1), 37–70. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(98\)00075-0](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(98)00075-0)
- Gereffi, G. (2018). *Global value chains and development: Redefining the contours of 21st century capitalism*. Cambridge University Press.

Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104.

<https://doi.org/10.1080/09692290500049805>

Goldberg, P. K., & Pavcnik, N. (2016). The effects of trade policy. In K. Bagwell & R. W. Staiger (Eds.), *Handbook of commercial policy* (Vol. 1A, pp. 161–206). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.hescop.2016.04.002>

Grossman, G. M., & Helpman, E. (1994). Protection for sale. *American Economic Review*, 84(4), 833–850.

Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth*, 12, 1–25. <https://doi.org/10.1007/s10887-006-9009-4>

Helpman, E., Melitz, M. J., & Yeaple, S. R. (2004). Export versus FDI with heterogeneous firms. *American Economic Review*, 94(1), 300–316. <https://doi.org/10.1257/000282804322970814>

Hoekman, B. M., & Kostecki, M. M. (2009). *The political economy of the world trading system: The WTO and beyond* (3rd ed.). Oxford University Press.

Hummels, D., Ishii, J., & Yi, K.-M. (2001). The nature and growth of vertical specialization in world trade. *Journal of International Economics*, 54(1), 75–96. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(00\)00093-3](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(00)00093-3)

Johnson, R. C., & Noguera, G. (2012). Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added. *Journal of International Economics*, 86(2), 224–236. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2011.10.003>

Kee, H. L., Nicita, A., & Olarreaga, M. (2009). Estimating trade restrictiveness indices. *Economic Journal*, 119(534), 172–199. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02209.x>

Koopman, R., Wang, Z., & Wei, S.-J. (2014). Tracing value-added and double counting in gross exports. *American Economic Review*, 104(2), 459–494. <https://doi.org/10.1257/aer.104.2.459>

Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. *American Economic Review*, 64(3), 291–303.

Krugman, P. (1987). Is free trade passé? *Journal of Economic Perspectives*, 1(2), 131–144. <https://doi.org/10.1257/jep.1.2.131>

Limão, N. (2016). Preferential trade agreements. In K. Bagwell & R. W. Staiger (Eds.), *Handbook of commercial policy* (Vol. 1B, pp. 279–367). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.hescop.2016.04.003>

Mattoo, A., Rocha, N., & Ruta, M. (Eds.). (2020). *Handbook of deep trade agreements*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1539-3>

Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695–1725. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00467>

Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. (2026). *Technical regulations on selected strategic commodity exports*. Ministry of Trade.

Nenci, S. (2020). The effects of trade agreements on international value chains. *World Economy*, 43(11), 2789–2824. <https://doi.org/10.1111/twec.13036>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD trade policy papers and global trade outlook*. OECD.

Piermartini, R., & Yotov, Y. V. (2016). Estimating trade policy effects with structural gravity. *WTO Staff Working Paper*. <https://doi.org/10.30875/8b8f2259-en>

Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2008(2), 365–412. <https://doi.org/10.1353/eca.0.0020>

Rodrik, D. (2018). New technologies, global value chains, and developing economies. *Pathways for Prosperity Commission Background Paper Series*.

Timmer, M. P., Erumban, A. A., Los, B., Stehrer, R., & de Vries, G. J. (2014). Slicing up global value chains. *Journal of Economic Perspectives*, 28(2), 99–118. <https://doi.org/10.1257/jep.28.2.99>

United Nations Conference on Trade and Development. (2025). *World investment report 2025*. UNCTAD.

World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank.

World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects*. World Bank.

World Trade Organization. (2025). *Report on G20 trade measures*. WTO.

World Trade Organization. (2026). *Global trade outlook and statistics*. WTO.

World Trade Organization. (2026). *Trade monitoring and trade policy developments*. WTO.

Yi, K.-M. (2003). Can vertical specialization explain the growth of world trade? *Journal of Political Economy*, 111(1), 52–102. <https://doi.org/10.1086/344805>

Catatan: sumber resmi seperti BPS, WTO, OECD, UNCTAD, World Bank, Uni Eropa, dan Kementerian Perdagangan umumnya tidak selalu memiliki DOI karena berupa laporan institusional atau regulasi; DOI dicantumkan pada artikel jurnal, buku akademik digital, dan working paper yang menyediakannya.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 8 Juni 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a225a06-3f70-83ec-bc5e-1c93a8a5ed2e>